

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

## KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia - Penulis  
**TEMA** : Politik Integrasi ASEAN  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Kompas

Hari **Jum'at** Tanggal **27** Bulan **Februari** Tahun **2009** Halaman **6** Kolom **1**

### RINGKASAN :

Terkait dengan rencana akan dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*), Syamsul Hadi, Pengajar Ekonomi Politik Internasional FISIP UI, menulis bahwa apabila dikaitkan dengan komentar Denis Hew (2005), substansi Piagam ASEAN sebagai dasar pembentukan Komunitas ASEAN mengingatkan pada *Treaty of Rome* (1958) dan *Treaty of Maastricht* (1992) yang meletakkan dasar bagi pembentukan Uni Eropa yang telah terintegrasi secara ekonomi, keamanan dan politik luar negeri, serta kepolisian dan peradilan. Jalan menuju integrasi ASEAN layaknya Uni Eropa pun sudah dimulai dengan adanya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*). Akan tetapi integrasi ASEAN ini sepertinya masih harus dikaji lebih cermat. Misalnya di bidang politik dan keamanan, sengketa perbatasan Thailand-Kamboja justru lebih baik jika diselesaikan secara bilateral antara kedua negara. Contoh lain adalah kudeta militer di Thailand dan pelanggaran HAM di Myanmar yang tentunya akan sangat sulit diselesaikan secara regional karena menyangkut kedaulatan suatu negara. Apalagi dengan adanya integrasi pasar nasional ke pasar regional juga akan berimplikasi menurunnya otonomi negara dalam pembuatan kebijakan. Sehingga prinsip *survival of the fittest* akan berlaku, yang pada akhirnya akan menyulitkan penciptaan struktur industri nasional.

### CATATAN :

# Politik Integrasi ASEAN

Oleh SYAMSUL HADI

**K**TT Ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand, 27 Februari-1 Maret 2009 merupakan KTT ASEAN pertama setelah pemberlakuan Piagam ASEAN. Dalam KTT ini akan ditandatangani Chiang Mai Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015, menggantikan Vientiane Plan of Action.

Chiang Mai Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community bertujuan menjadikan ASEAN sebagai "kawasan yang damai, demokratis, terbuka, adil, transparan, toleran, inklusif, harmonis dengan pasar dan basis produksi tunggal, serta berorientasi kepada masyarakat".

Terkait dengan hal itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan, diplomasi Indonesia sepanjang 2009 akan diprioritaskan pada persiapan infrastruktur ASEAN (*Kompas*, 7/1). Setelah cetak biru Komunitas ASEAN di bidang ekonomi ditandatangani di Singapura (2007), Indonesia menginginkan keberadaan Komunitas ASEAN segera dilengkapi dengan cetak biru Komunitas ASEAN di bidang politik keamanan dan sosial budaya. Bagaimanakah dampak ekonomi politik proyek Komunitas ASEAN itu bagi Indonesia?

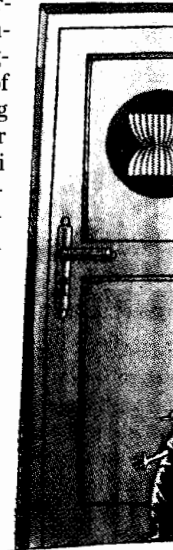
## Inspirasi Eropa


"Pandangan resmi" dalam ASEAN menyatakan, ASEAN tidak diarahkan mengikuti model integrasi Uni Eropa. Namun, saat mengomentari rancangan Piagam ASEAN, Denis Hew (2005) menyatakan, substansi Piagam ASEAN mengingatkan orang pada muatan Treaty of Rome yang diratifikasi negara-negara Eropa Barat tahun 1958, ditujukan untuk "meletakkan fondasi bagi penyatuan rakyat Eropa".

Meski ada nuansa perbedaan, tiga pilar Komunitas ASEAN juga mengingatkan pada Treaty of Maastricht (1992) yang mendeklarasikan tiga pilar Uni Eropa: (1) integrasi ekonomi sebagai pilar sentral, (2) kebijakan bersama di bidang keamanan dan politik luar negeri, dan (3) kerja sama bidang kepolisian dan peradilan. Lebih dari Piagam ASEAN, Perjanjian Maastricht memperkenalkan kewarganegaraan Eropa dan *single currency*, hal yang hingga kini belum resmi didiskusikan di ASEAN. Namun, indikasi ke sana bukan tidak ada, misalnya ide mata uang tunggal ASEAN yang mulai "dikaji" Singapura.

Secara historis, inspirasi menuju integrasi ASEAN berasal dari proyek Uni Eropa yang diluncurkan pada 1992, diawali dengan ide Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) yang disetujui di Singapura tahun yang sama. Seperti Uni Eropa, Komunitas ASEAN yang disepakati tahun 2003 merupakan "penyempurnaan AFTA" yang bersifat *business oriented*. Hanya muatan ekonomi yang termaktub dalam *blue print* Komunitas Ekonomi ASEAN yang dapat diimplementasikan secara "terukur" dalam bentuk penurunan tarif barang, liberalisasi sektor jasa, dan fasilitas investasi.

Di bidang politik keamanan, konflik antarnegara anggota semacam sengketa perbatasan Kamboja-Thailand akan lebih banyak diselesaikan dengan mekanisme bilateral, bukan mekanisme regional (ASEAN). Dalam realitasnya, sulit membayangkan intervensi ASEAN yang "konkret" atas ku-





deta militer di Thailand atau pelanggaran HAM di Myanmar karena prinsip menghormati kedaulatan politik memang ditonjolkan dalam Piagam ASEAN. Apalagi Piagam ASEAN tidak menyebutkan mekanisme penerapan sanksi menyangkut pelanggaran prinsip demokrasi.

Di bidang sosial budaya, mewujudkan ASEAN yang *people oriented* juga tak semudah mengucapkan. Dalam proses ratifikasi Piagam ASEAN, misalnya, beberapa anggota DPR Indonesia mengeluhkan sempitnya waktu untuk memahami substansi Piagam ASEAN, lalu meratifikasinya. Yang terjadi adalah sosialisasi oleh pemerintah kepada wakil

JITET

rakyat tentang apa itu Piagam ASEAN, bukan penyerapan aspirasi rakyat dalam proses penyusunan. Sementara kebebasan aliran modal dan jasa difasilitasi semangat, dalam perburuhan yang difasilitasi hanya tenaga kerja berkeahlian tinggi (*free flow of skilled labour*). Lagi-lagi yang diuntungkan adalah negara yang lebih kuat dalam pemilikan modal dan sumber daya manusia, seperti Singapura dan Malaysia.

## Pengalaman NAFTA

Dalam perspektif realisme, regionalisme yang berarti integrasi pasar nasional ke pasar regional berimplikasi menurunnya otonomi negara dalam pembuatan kebijakan pembangunan karena keharusan menyesuaikan kebijakan nasional dengan aturan regional. Yang terjadi kemudian bukan hanya "komplementaritas ekonomi" antarnegara, tetapi persaingan terbuka yang dilembagakan di tingkat regional. Prinsip *survival of the fittest* berlaku. Akibatnya, penciptaan struktur industri

nasional yang terintegrasi menjadi lebih sulit diwujudkan. Apalagi, seperti disinyalir Utama Kayo dari Kadin, kepedulian masyarakat Indonesia, termasuk pebisnis, terhadap proses di ASEAN masih rendah sehingga antisipasi terhadap kehadiran Komunitas ASEAN amat minim.

Seperti ASEAN, pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) pada 1994 yang melibatkan AS, Kanada, dan Meksiko juga terinspirasi dari kehadiran Uni Eropa. Saat itu para pendukung regionalisme meramalkan, NAFTA yang meliputi 376 juta orang akan meningkatkan kemakmuran warganya dan akan mengurangi kesenjangan ekonomi AS-Meksiko. Faktanya, seperti diungkapkan Stiglitz (2006), 10 tahun se usai NAFTA diimplementasikan, kesenjangan pendapatan antara warga AS dan Meksiko meningkat 10 persen. Meksiko juga lebih tergantung secara ekonomi kepada AS. Belakangan, sebagian besar rakyat AS merasa dirugikan NAFTA, terutama dengan "direbutnya" lapangan kerja untuk buruh murah oleh warga Meksiko. Tak heran bila dalam kampanyenya Obama menjanjikan negosiasi ulang terkait substansi NAFTA.

Jauh-jauh hari sebelum hadirnya ide Komunitas ASEAN, peran ASEAN bagi perwujudan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara tak diragukan lagi. Namun, di bidang ekonomi, dampak Komunitas ASEAN 2015 bagi Indonesia tampaknya perlu dikaji lebih cermat. Di tengah kecenderungan Indonesia untuk selalu "tampil progresif" di ASEAN, kasus NAFTA tentu memberikan pelajaran berharga.

SYAMSUL HADI

*Pengajar Ekonomi Politik  
Internasional di FISIP UI*